

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA SELAAWI, KECAMATAN SELAAWI, KABUPATEN GARUT

Guruh Purnama¹, Mulyaningsih², Susniwati³

^{1,2,3}Universitas Garut, Indonesia

Email: guruhpurnama38@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa efektivitas pembangunan desa masih berada pada taraf yang kurang maksimal, kendati alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah relatif besar. Di tataran praktis, ditemukan hambatan struktural yang meliputi rendahnya sinkronisasi koordinasi antraparatur, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya peran aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi. Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi kebijakan tata kelola keuangan desa dan tingkat partisipasi warga terhadap efektivitas pembangunan di Desa Selaawi. Dengan mengusung pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif-verifikatif, data primer dikumpulkan dari 98 responden melalui instrumen angket. Analisis data dilakukan dengan teknik SEM-PLS berbantuan SmartPLS, serta berlandaskan pada kerangka teoretis dari Edward III (implementasi kebijakan), Cohen & Uphoff (partisipasi masyarakat), serta Steers & Duncan (efektivitas pembangunan). Hasil uji hipotesis mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembangunan. Selaras dengan itu, partisipasi masyarakat juga terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Secara simultan, kedua variabel determinan tersebut mampu menjelaskan 60% varians efektivitas pembangunan desa. Dengan demikian, optimalisasi capaian pembangunan desa dapat diwujudkan melalui sinergi antara pengelolaan anggaran yang disiplin dan pelibatan komunitas secara aktif di seluruh tahapan proses pembangunan.

Kata Kunci: Efektivitas Pembangunan, Kebijakan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study is prompted by the persistent gap between the substantial village fund allocations disbursed by the government and the actual effectiveness of development outcomes at the local level. The practical constraints identified in the field encompass poor coordination among officials, insufficient human resource competencies, and the limited role of residents in monitoring and evaluation activities. Hence, this research sets out to assess the effects of implementing village financial management policies and the extent of public participation on the developmental outcomes in Selaawi Village. Adopting a quantitative descriptive-verificative framework, primary data were drawn from 98 respondents using a questionnaire. The analytical procedure was carried out via SEM-PLS with SmartPLS, anchored in the theoretical foundations of Edward III (policy execution), Cohen and Uphoff (citizen participation), and Steers and Duncan (development performance). The hypothesis testing reveals that both village financial policy execution and community participation yield positive, significant impacts. In combination, these two variables account for 60% of the variance in development effectiveness. In essence, to fully realize development targets, there

must be a complementary alignment between strict financial oversight and the proactive integration of community members across all project stages.

Keywords: *Development Effectiveness, Village Financial Policy, Community Participation*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, di mana desa berperan sebagai pelaku utama dalam proses peningkatan taraf hidup masyarakat (Sunarso, 2023). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan otonom untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk tata kelola keuangannya. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa memegang peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan (Abidin, 2015). Namun, tata kelola administratif semata belum cukup untuk menjamin kesuksesan; pelaksanaannya membutuhkan birokrasi yang andal serta keterlibatan aktif dari warga desa.

Secara teoretis, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi dipengaruhi oleh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Di samping itu, partisipasi masyarakat merupakan pilar utama pembangunan. Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna harus komprehensif, mencakup tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Keterpaduan antara kebijakan yang diimplementasikan dengan baik dan partisipasi yang tinggi diharapkan mampu mewujudkan efektivitas pembangunan, yang ukurannya mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi lingkungan (Duncan dalam Steers, 1985).

Meskipun kerangka regulasi dan teoretis sudah mapan, kondisi empiris menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan di Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Berdasarkan data dan observasi awal, pembangunan desa seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Pembangunan didominasi oleh fisik infrastruktur, sementara alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti BUMDes dan pembinaan PKK, masih sangat minim. Ironisnya, sekitar 50% jalan desa yang telah dibangun kini dalam kondisi rusak sedang hingga berat akibat kurangnya rasa memiliki dan pemeliharaan dari warga. Masalah integrasi juga terlihat dari kurang transparannya aparatur pemerintah desa dalam mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada elemen masyarakat secara luas.

Belum optimalnya efektivitas pembangunan desa tersebut diindikasikan kuat dipengaruhi oleh kendala pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan lemahnya partisipasi masyarakat. Dari sisi pelaksanaan kebijakan, ditemukan fenomena tumpang tindih penyelesaian tugas, lemahnya koordinasi antar aparatur (struktur birokrasi), serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat perangkat desa. Sementara itu, dari sisi partisipasi masyarakat, terlihat indikasi minimnya kehadiran warga dalam forum pengambilan keputusan (Musrenbangdes), memudarnya budaya gotong royong, serta pasifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengevaluasi dan mengawasi program pembangunan.

Fenomena kesenjangan antara target kebijakan pemerintah desa dan realitas yang dirasakan oleh masyarakat menjadikan penelitian ini sangat mendesak (urgen) untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa terhadap efektivitas pembangunan desa, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan desa, dan pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap efektivitas pembangunan desa di Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Dinamika Implementasinya

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah serangkaian intervensi terencana oleh pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat atau mencapai sasaran strategis tertentu (Budi Winarno, 2012). Agar sasaran tersebut dapat terealisasi, tahapan implementasi menjadi titik penentu yang sangat krusial. Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980) untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut kerangka Edwards III, terdapat empat dimensi utama yang mendikte keberhasilan pelaksanaan kebijakan: (1) Komunikasi, yang menuntut penyampaian arahan secara jelas dan tanpa ambiguitas; (2) Sumber daya, meliputi kecukupan personel, kewenangan, informasi, dan fasilitas pendukung; (3) Disposisi, yang merepresentasikan watak, komitmen, dan penerimaan aparatur pelaksana; serta (4) Struktur birokrasi, yang berfokus pada keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tata kelola pembagian tanggung jawab (fragmentasi) yang terkoordinasi dengan baik.

2. Manajemen Keuangan Desa

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa diberikan kewenangan otonom dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya, termasuk hak di bidang fiskal yang terealisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian siklus aktivitas yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam menjalankan siklus tersebut, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi suatu keharusan, yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepatuhan terhadap tertib dan disiplin anggaran (Ambodo, 2023).

3. Kontribusi Sosial Masyarakat

Ndraha (2023) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai pelibatan unsur kognitif, afektif, dan fisik secara sukarela oleh warga dalam proses pembangunan, yang digerakkan oleh kesadaran akan tanggung jawab bersama. Guna mengukur bentuk partisipasi ini secara utuh, penelitian ini mengacu pada kerangka dimensi yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977). Dalam perspektif tersebut, partisipasi dibagi ke dalam empat fase kunci, yaitu: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan (identifikasi masalah dan penyusunan rencana); (2) keterlibatan dalam tahap operasional (berupa sumbangsih sumber daya, dana, tenaga, ataupun waktu); (3) keterlibatan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan; serta (4) keterlibatan dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap program pembangunan.

4. Efektivitas Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Todaro & Smith, 2018). Efektivitas adalah ukuran sejauh mana pembangunan tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik dari segi *output* maupun *outcome* (Makmur, 2011). Indikator efektivitas pembangunan dalam studi ini mengacu pada kerangka Richard M. Steers (1985) yang mengutip pemikiran Duncan, yang meliputi: (1) Pencapaian tujuan (*goal attainment*); (2) Integrasi, yaitu kemampuan organisasi atau sistem dalam mensosialisasikan, menyatukan, dan mengkomunikasikan program; serta (3) Adaptasi, yaitu sejauh mana hasil pembangunan mampu menyesuaikan dan merespons kebutuhan serta dinamika lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dibangun di atas pijakan beberapa riset terdahulu yang membuktikan adanya keterkaitan antara manajemen keuangan desa, partisipasi warga, dan hasil pembangunan. Handayani (2024) menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Giriwarno. Secara terpisah, penelitian Octaningrum dkk. (2025) di Sulawesi Selatan menegaskan bahwa dinamika partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan keberlanjutan infrastruktur desa.

Lebih lanjut, riset Agustina & Gunawan (2025) menyoroti bahwa penerapan asas akuntabilitas dan transparansi sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Veronika & Basri (2023) juga menemukan bahwa pemahaman aparatur (*competence*) dan partisipasi penyusunan anggaran berdampak langsung pada kualitas pelaporan dan hasil evaluasi desa. Meskipun banyak penelitian yang menyoroti pengelolaan keuangan atau partisipasi masyarakat secara terpisah, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan dimensi implementasi kebijakan (Edwards III) dan tahapan partisipasi utuh (Cohen & Uphoff) untuk memotret dampaknya secara simultan terhadap capaian efektivitas pembangunan komprehensif (Duncan) pada tingkat pemerintahan desa.

C. METODE

Guna membedah relasi sebab-akibat antarvariabel secara parsial dan simultan, kajian ini dioperasikan menggunakan metode kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*). Langkah metodologis ini diambil demi memberikan penjelasan komprehensif mengenai posisi variabel bebas terhadap variabel terikat yang sedang diuji hipotesisnya. Untuk pelaksanaan risetnya sendiri, peneliti mengambil tempat dan objek sasaran di lingkungan Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

Subjek yang menjadi populasi dalam kajian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki peran sekaligus merasakan langsung dampak dari program pembangunan di Desa Selaawi. Kelompok sasaran tersebut merepresentasikan aparatur pemerintahan desa, anggota BPD, jajaran pengurus RT/RW, figur tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Untuk penentuan sampelnya, peneliti mengaplikasikan metode *probability sampling* berbasis proporsional (*proportional random sampling*). Melalui pendekatan tersebut, ditetapkan total 98 individu sebagai responden akhir yang dipandang mampu merepresentasikan keragaman populasi secara komprehensif, sebagaimana diperinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Populasi Sampel

No	Kelompok Responden	Jumlah (Orang)	Teknik Sampling	Keterangan
1	Pegawai Pemerintah Desa	11	Sensus	Seluruh populasi dijadikan sampel
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7	Sensus	Seluruh anggota dijadikan sampel
3	Ketua RT	28	Sensus	Seluruh Ketua RT dijadikan sampel
4	Ketua RW	9	Sensus	Seluruh Ketua RW dijadikan sampel
5	Masyarakat	43	Random Sampling	Diambil sebagai perwakilan populasi: 7 Orang Ketua DKM 9 Orang Ketua Pemuda 9 Orang Tokoh Masyarakat 9 Orang Ketua Kelompok Tani 9 Orang Ketua Kader Posyandu

Penelitian ini mengandalkan penyebaran kuesioner tertutup berbasis Skala Likert (rentang 1-5) sebagai instrumen utama penjarangan data. Fokus pengukuran mencakup tiga aspek inti: Pertama, variabel kebijakan pengelolaan keuangan desa (dijabarkan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta birokrasi). Kedua, variabel partisipasi masyarakat (diukur lewat tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan kontrol evaluasi). Ketiga, variabel efektivitas pembangunan (dinilai dari pemenuhan target, integrasi, dan adaptabilitas). Sebagai penunjang data lapangan, peneliti juga melakukan telaah terhadap data sekunder yang terdiri dari kajian kepustakaan dan dokumen-dokumen internal desa seperti APBDes.

Untuk menganalisis data, riset ini mengaplikasikan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS. Pendekatan statistik ini diprioritaskan mengingat keunggulannya dalam membedah model sebab-akibat yang rumit tanpa harus terikat pada syarat normalitas distribusi data. Secara teknis, tahapan pengujian dibagi menjadi dua fase esensial. Fase pertama berfokus pada pengujian *Outer Model* (model pengukuran) guna memverifikasi kelayakan instrumen melalui parameter validitas (konvergen dan diskriminan) serta konsistensi alat ukur (*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*). Fase kedua merupakan evaluasi *Inner Model* (model struktural) yang bertujuan menakar daya prediksi model (melalui skor *R-Square* dan *f-Square*) sekaligus membuktikan signifikansi hipotesis lewat uji *path coefficients* berbantuan metode *bootstrapping* pada level kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi tingkat kecamatan, Desa Selaawi memiliki posisi strategis. Namun, efektivitas pembangunannya dinilai belum optimal, yang mendorong perlunya evaluasi terhadap implementasi tata kelola keuangan dan partisipasi warga. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 98 responden, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa rata-rata berada pada kategori "Cukup Baik" (skor 2,95), dengan titik terlemah pada dimensi struktur birokrasi, khususnya kordinasi antar pelaksana. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat juga berada pada kategori "Cukup Baik" (skor 2,96), namun masih rendah pada aspek penikmatan/kepuasan terhadap hasil pembangunan.

1. Hasil Uji Model Pengukuran dan Struktural (Outer dan Inner Model)

Validitas dan reliabilitas instrumen dalam studi ini telah teruji melalui pengolahan data menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Mengacu pada Tabel 2, seluruh konstruk memperlihatkan nilai AVE > 0,50, di samping nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* yang seluruhnya > 0,70, sehingga memenuhi syarat kelayakan alat ukur.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Outer Model)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	0.951	0.957	0.671	Valid & Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.963	0.967	0.711	Valid & Reliabel
Efektivitas Pembangunan Desa (Y)	0.935	0.946	0.660	Valid & Reliabel

Sumber: Data Primer diolah dengan *SmartPLS* (2025)

Pengujian pada jalur struktural menghasilkan nilai R-Square 0,600, yang berarti bahwa variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara gabungan memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap variabilitas Efektivitas Pembangunan Desa (Y). Sisanya, 40%, merupakan pengaruh dari berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis ini.

Hasil uji *bootstrapping* untuk melihat signifikansi pengaruh antar variabel dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	t Statistics ((O/STDEV))	p Values	Keterangan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa -> Efektivitas Pembangunan Desa	0,626	0,625	0,061	10,301	0,000	Diterima
Partisipasi Masyarakat -> Efektivitas Pembangunan Desa	0,435	0,445	0,069	6,260	0,000	Diterima

Nilai $\beta = 0,626$, t -hitung = 10,301 ($> 1,96$), dan $p = 0,000$ ($< 0,05$), dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan berarti secara statistik terhadap efektivitas pembangunan desa. Demikian pula, keterlibatan masyarakat (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang dibuktikan oleh koefisien $\beta = 0,435$, t -statistik = 6,260, serta nilai probabilitas 0,000, sehingga seluruh kriteria signifikansi terpenuhi dengan baik.

2. Efektivitas Pembangunan Desa Ditinjau dari Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa semakin baik tata kelola keuangan desa, maka pembangunan desa di Desa Selaawi akan semakin efektif. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, bahwa kebijakan tidak hanya sekadar dirumuskan, tetapi memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi aparatur yang baik, dan struktur birokrasi yang jelas. Di lapangan, kendala tumpang tindih penyelesaian tugas dan lemahnya sinergi antar instansi desa menjadi faktor penghambat pencapaian target. Apabila aspek birokrasi administratif ini dibenahi, seperti penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang utuh, maka integrasi program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat dapat tercapai.

3. Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Desa

Penelitian ini juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memegang peranan krusial. Merujuk pada konsep Cohen dan Uphoff, partisipasi tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan (Musrenbangdes), tetapi wajib berlanjut ke tahap pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Kondisi empiris di Desa Selaawi menunjukkan banyak infrastruktur cepat rusak karena minimnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dari warga, yang berakar pada kurangnya keterlibatan mereka sejak awal. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif (baik berupa gagasan, tenaga, maupun pengawasan), hasil pembangunan terbukti lebih tepat sasaran, adaptif terhadap lingkungan sosial, dan dapat dijaga keberlanjutannya.

4. Pengaruh Gabungan Kebijakan dan Partisipasi terhadap Efektivitas Pembangunan

Secara simultan, kontribusi sebesar 60% menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa merupakan hasil dari kombinasi dua elemen kunci: faktor struktural (kebijakan dari atas ke bawah) dan faktor sosial (keterlibatan masyarakat dari bawah ke atas). Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers, yang menyatakan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh dinamika faktor internal (aparatur desa dan tata kelola kebijakan) serta faktor eksternal (masyarakat luas). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak dapat berdiri sendiri; ia akan tercapai secara optimal hanya apabila birokrasi pemerintah desa bekerja dengan baik dan bersinergi dengan partisipasi masyarakat yang aktif dan konstruktif.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembangunan desa di Desa Selaawi. Meskipun secara deskriptif pelaksanaannya dinilai "cukup baik", masih terdapat kelemahan pada aspek optimalisasi koordinasi antar pelaksana kebijakan yang perlu segera dibenahi. Partisipasi masyarakat juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembangunan desa. Tingkat keterlibatan warga yang masuk kategori "cukup baik" masih perlu ditingkatkan, khususnya pada tahap pengawasan program dan pemanfaatan hasil pembangunan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat semakin kuat. Secara simultan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 60% terhadap efektivitas pembangunan desa. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak dapat dicapai hanya dengan tata kelola birokrasi administratif yang baik, melainkan harus berjalan sinergis dengan pelibatan aktif masyarakat.

Sebagai implikasi praktis, Pemerintah Desa Selaawi disarankan untuk memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sinergi antar aparatur desa guna menghindari tumpang tindih penyelesaian tugas. Selain itu, perlu dibuka ruang yang lebih luas dan transparan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tidak hanya pada saat perencanaan (Musrenbangdes), tetapi hingga tahapan evaluasi. Mengingat masih terdapat 40% faktor lain yang memengaruhi efektivitas pembangunan desa di luar variabel penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel tambahan seperti kepemimpinan kepala desa, transparansi publik, dan kapasitas kelembagaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Agustina, P., & Gunawan, B. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-58.
- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 35-51.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. New York: World Bank.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Handayani, R., Suprihati, S., & Utami, W. B. (2024). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Giriwarno. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ndraha, T. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octaningrum, A., Zuniati, A. R., & Aulia, H. N. (2025). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(01), 113.
- Steers, R. M. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. California: Goodyear Publishing Company.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Veronika, Y., & Basri, Y. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 19(2), 91-105.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.